

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul "KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti rekaman suara dalam pembuktian pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Apa saja yang menjadi kendala penggunaan alat bukti rekaman suara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .

Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua alat bukti pada Hukum Acara Pidana memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Atas dasar kesamaan tersebut hakim bebas serta tidak terikat untuk memakai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, manakala menurut hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Begitu pula dengan alat bukti suara, hakim bebas serta tidak terikat untuk menggunakannya di dalam pembuktian di persidangan. Kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi digolongkan menjadi 2 yaitu kendala internal (dari dalam KPK) dan kendala eksternal (dari luar KPK).

Kata Kunci : Kekuatan Alat Bukti, Rekaman Suara, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study, entitled "STRENGTHS OF SOUND RECORDING EQUIPMENT IN THE PROCESS OF ERADICATION OF CORRUPTION ACTION BY THE COMMISSION OF ERADICATION OF CORRUPTION (KPK)" aims to find out how the legal strength of sound evidence in proving the eradication of corruption by the Corruption Eradication Commission and what are the obstacles the use of sound recording instruments in the eradication of corruption by the Corruption Eradication Commission.

The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study it can be concluded that all evidence in the Criminal Procedure Code have the same evidentiary power. On the basis of similarity the judge is free and not bound to use the evidence presented at the trial, when according to the judge the evidence does not have proof value. Likewise with sound evidence, free judges and not bound to use it in evidence at the trial. Constraints on the use of sound proof evidence in the process of eradicating corruption are classified into 2, namely internal constraints (from within the KPK) and external constraints (from outside the KPK)

Keywords : Strength of Evidence, Sound Recording, and Eradication of Corruption Crimes

